



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PENGEMBANGAN  
EKOSISTEM KETENAGAKERJAAN**

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN, DAN PARIWISATA  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chairul Saleh

Jabatan : Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dida Gardera

Jabatan : Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua,

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri,  
Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

  
Dida Gardera

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Peningkatan  
Produktivitas dan Pengembangan  
Ekosistem Ketenagakerjaan

  
Chairul Saleh

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

**ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM KETENAGAKERJAAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas	1.1 Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah Tinggi	63.61%
		1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	56.40 - 59.32%
		1.3 Cakupan Kepesertaan Pekerja pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional	35.09%
		1.4 Indeks Peningkatan Kompetensi Peserta Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi untuk Stimulus Ekonomi	3 dari 4
2	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas	2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	80%
		2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	80%
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	3 dari 4
4	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	92%

**Kegiatan**

1. Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan

**Anggaran**

Rp 817.663.000,-\*

Rp 1.105.353.000,-\*

**Rp 1.923.016.000,-\***

**Total**

(Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Belas Ribu Rupiah)

Pihak Kedua,

Pt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

**Dida Gardera**

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan

**Chairul Saleh**

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan  
Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata**

**KODE IKU: 1.1**

**Sasaran Kegiatan**

SS.1. Terwujudnya Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas

**Deskripsi Sasaran Kegiatan**

Peningkatan produktivitas dan pengembangan ekosistem ketenagakerjaan yang berkualitas diwujudkan melalui penguatan struktur tenaga kerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta penguatan inklusivitas pasar kerja melalui peningkatan TPAK perempuan. Sakernas Agustus 2025, dari total 154 juta angkatan kerja, struktur pendidikan tenaga kerja masih didominasi oleh kelompok dengan pendidikan rendah. Proporsi angkatan kerja lulusan pendidikan rendah (SMP/MTs ke bawah) sebesar 51,86%, sementara lulusan pendidikan menengah (SMA/SMK) sebesar 35,08%, dan lulusan pendidikan tinggi (Diploma/Universitas) baru mencapai sebesar 13,06%. Selain itu, struktur ketenagakerjaan juga masih dihadapkan masih rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan, di mana per Agustus 2025, TPAK perempuan tercatat sebesar 56,63%. Meskipun terdapat kenaikan tipis dibandingkan periode sebelumnya, angka ini masih terpaut jauh dari TPAK laki-laki yang mencapai 84,40%. Ekosistem ketenagakerjaan yang berkualitas adalah ekosistem yang mendukung terciptanya pekerjaan layak, tenaga kerja kompeten, hubungan industrial harmonis, serta pasar kerja yang inklusif dan berdaya saing.

**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

IKU.1.1 Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah Tinggi

**Deskripsi IKU**

Definisi
<p>Pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan kemampuan ekonomi untuk menyediakan lapangan kerja dengan jabatan atau okupasi yang membutuhkan keahlian tingkat menengah dan tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenaga kerja berkeahlian tinggi (<i>skilled labor</i>) adalah tenaga kerja yang pada umumnya berpendidikan tinggi dan memiliki pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya, sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi.</li> <li>• Tenaga kerja berkeahlian menengah (<i>semi-skilled labor</i>) adalah tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi.</li> </ul> <p>Asdep Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lintas sektoral untuk memastikan terciptanya ekosistem pasar kerja yang mampu menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi keahlian menengah dan tinggi. Dalam hal ini, akan dilakukan melalui pemetaan keselarasan (<i>link and match</i>) antara tenaga kerja berkeahlian menengah hingga tinggi (<i>supply</i>) dengan kebutuhan industri (<i>demand</i>). Peran ini mencakup analisis mendalam terhadap penyiapan tenaga kerja yang mendukung transformasi ekonomi, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti ekonomi digital, pekerjaan ramah lingkungan (<i>green jobs</i>), dan hilirisasi industri. Hal ini dilakukan melalui fungsi pengendalian kebijakan lintas sektor guna memastikan kementerian dan lembaga teknis melakukan intervensi yang tepat dalam penyiapan tenaga kerja berkeahlian tinggi (<i>skilled labor</i>) dan menengah (<i>semi-skilled labor</i>).</p>
Formula
$Pekerja\ Berkeahlian = \left( \frac{\sum_{i=1}^6 y_i}{\sum_{i=0}^9 y_i} \right) \times 100\% ; i = 0,1,2, \dots, 9$
<p><b>Keterangan:</b>                      Pekerja Berkeahlian=Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah tinggi (%)                      Yi = Jumlah pekerja dari aspek ke-i                      0 = TNI/ Polri                      1 = Manajer                      2 = Profesional                      3 = Teknisi dan asisten profesional                      4 = Tenaga tata usaha                      5 = Tenaga usaha jasa dan tenaga penjualan                      6 = Pekerja terampil pertanian, kehutanan, dan perikanan                      7 = Pekerja pengolahan, kerajinan, dan YBDI                      8 = Operator dan perakitan mesin                      9 = Pekerja kasar</p>

Basis Data menggunakan Dokumen Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia yang dipublikasikan BPS. Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah pekerja dalam jabatan (1) manajer; (2) profesional; (3) teknisi dan asisten profesional; (4) tenaga tata usaha; (5) tenaga usaha jasa dan tenaga penjualan; dan (6) pekerja terampil pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan total jumlah penduduk yang bekerja (1 s.d. 9).

**Tujuan**  
Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi dengan satuan nilai dalam bentuk persentase menunjukkan seberapa dominan pekerja yang bekerja pada bidang keahlian atau jabatan menengah dan tinggi dari keseluruhan total pekerja. Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin dominan pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi. Sehingga, tenaga kerja dapat menghasilkan produktivitas tinggi dan produk yang bernilai tambah tinggi.

<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase (%)		
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Badan Pusat Statistik (BPS)		
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan		
<b>Sumber Data</b>	BPS : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)		
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(...) High	(X) Moderate	(....) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(...) Exact	( X) Proxy	(....) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(...) Sum	(....) Average	(X) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	( X ) Cascading Peta	(....) Cascading Non Peta	(....) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(X) Direct	(....) Indirect	
<b>Polarisasi IKU</b>	( X ) Maximize	( ... ) Minimize	(.....) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	(...) Bulanan	(....) Triwulanan	(X) Semesteran
			(....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	N/A	N/A	<b>62,97%</b>	68,24%	<b>63.61%</b>
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	<b>62,13%</b>	61,09%	<b>62,97%</b>
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	<b>62,50%</b>	61,09%	<b>63,29%</b>
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	<b>62,50%</b>	68,79%	<b>63,29%</b>
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	<b>62,97%</b>	68,24%	<b>63.61%</b>

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan  
Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata**

**KODE IKU: 1.2**

**Sasaran Kegiatan**

SS.1. Terwujudnya Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas

**Deskripsi Sasaran Kegiatan**

Peningkatan produktivitas dan pengembangan ekosistem ketenagakerjaan yang berkualitas diwujudkan melalui penguatan struktur tenaga kerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta penguatan inklusivitas pasar kerja melalui peningkatan TPAK perempuan. Sakernas Agustus 2025, dari total 154 juta angkatan kerja, struktur pendidikan tenaga kerja masih didominasi oleh kelompok dengan pendidikan rendah. Proporsi angkatan kerja lulusan pendidikan rendah (SMP/MTs ke bawah) sebesar 51,86%, sementara lulusan pendidikan menengah (SMA/SMK) sebesar 35,08%, dan lulusan pendidikan tinggi (Diploma/Universitas) baru mencapai sebesar 13,06%. Selain itu, struktur ketenagakerjaan juga masih dihadapkan masih rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan, di mana per Agustus 2025, TPAK perempuan tercatat sebesar 56,63%. Meskipun terdapat kenaikan tipis dibandingkan periode sebelumnya, angka ini masih terpaut jauh dari TPAK laki-laki yang mencapai 84,40%. Ekosistem ketenagakerjaan yang berkualitas adalah ekosistem yang mendukung terciptanya pekerjaan layak, tenaga kerja kompeten, hubungan industrial harmonis, serta pasar kerja yang inklusif dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan koordinasi, sinkronisasi, perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan program lintas sektoral di bidang ketenagakerjaan.

**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

IKU.1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

**Deskripsi IKU**

Definisi
<p>Angkatan Kerja Perempuan adalah penduduk perempuan yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.</p> <p><b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan</b> adalah indikator yang menggambarkan tingkat keterlibatan perempuan usia kerja dalam pasar tenaga kerja. Indikator ini menunjukkan seberapa besar proporsi perempuan usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi dibandingkan dengan seluruh jumlah perempuan dalam kelompok usia kerja. TPAK perempuan penting untuk mengukur kontribusi dan peran perempuan dalam perekonomian, serta menjadi dasar evaluasi kebijakan ketenagakerjaan dan kesetaraan gender.</p> <p>Nilai TPAK yang tinggi menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan yang memperoleh akses terhadap pasar tenaga kerja dan berkontribusi secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, nilai TPAK yang rendah dapat mencerminkan adanya hambatan struktural atau sosial, seperti beban kerja domestik, diskriminasi gender, keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan, atau kurangnya dukungan kebijakan yang memungkinkan perempuan bekerja secara produktif.</p> <p>Dalam hal ini, Asdep Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lintas kementerian/lembaga untuk meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan sebagai bagian dari penguatan daya saing SDM nasional. Peran ini berfokus pada penghapusan hambatan struktural dan sosial, seperti beban kerja domestik serta diskriminasi gender, guna memperluas akses perempuan terhadap pasar tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri. Melalui penyesuaian kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif, diharapkan kontribusi perempuan dalam ekonomi dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.</p>
Formula
$TPAK_p = \frac{PAK_p}{P_{(15+,p)}} \times 100\%$
<p>Keterangan:</p> <p><math>TPAK_p</math> = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)</p> <p><math>PAK_p</math> = Jumlah Angkatan Kerja Perempuan (orang)</p> <p><math>P_{(15+,p)}</math> = Jumlah Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas (orang)</p>
Tujuan
<p>TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (<i>labor supply</i>) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja.</p>

Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial.

**Satuan Pengukuran**

Persentase (%)

**Unit/Pihak Penyedia Data**

Badan Pusat Statistik (BPS)

**Pejabat Penanggung Jawab Data**

Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan

**Sumber Data**

BPS : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

**Tingkat Kendali IKU**

(...) High (X) Moderate (...) Low

**Tingkat Validitas IKU**

(X) Exact (...) Proxy (...) Activity

**Jenis Konsolidasi Periode**

(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value

**Jenis Cascading IKU**

( X ) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading

**Metode Cascading**

(X) Direct (...) Indirect

**Polarisasi IKU**

( X ) Maximize (...) Minimize (.....) Stabilize

**Periode Pelaporan**

(....) Bulanan (...) Triwulanan (X) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	56.30 - 58.80%	56,63%	56.40 - 59.32%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	56.30 - 58.80%	56,7%	56.40 - 59.32%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	56.30 - 58.80%	56,7%	56.40 - 59.32%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	56.30 - 58.80%	56,7%	56.40 - 59.32%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	56.30 - 58.80%	56,63%	56.40 - 59.32%



<b>Tingkat Validitas IKU</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Exact	<input type="checkbox"/> Proxy	<input type="checkbox"/> Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	<input type="checkbox"/> Sum	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta	<input type="checkbox"/> Cascading Non Peta	<input type="checkbox"/> Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	<input type="checkbox"/> Direct	<input checked="" type="checkbox"/> Indirect	
<b>Polarisasi IKU</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>32,15%</b>	<b>33,20%</b>	<b>35,09%</b>
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	29,77%	30,55%	33,67%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	31,00%	29,68%	34,15%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	31,00%	31,16%	34,62%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	32,15%	33,20%	35,09%

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan  
Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata**

**KODE IKU: 1.4**

**Sasaran Kegiatan**

SS.1. Terwujudnya Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas

**Deskripsi Sasaran Kegiatan**

Peningkatan produktivitas dan pengembangan ekosistem ketenagakerjaan yang berkualitas diwujudkan melalui penguatan struktur tenaga kerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta penguatan inklusivitas pasar kerja melalui peningkatan TPAK perempuan. Sakernas Agustus 2025, dari total 154 juta angkatan kerja, struktur pendidikan tenaga kerja masih didominasi oleh kelompok dengan pendidikan rendah. Proporsi angkatan kerja lulusan pendidikan rendah (SMP/MTs ke bawah) sebesar 51,86%, sementara lulusan pendidikan menengah (SMA/SMK) sebesar 35,08%, dan lulusan pendidikan tinggi (Diploma/Universitas) baru mencapai sebesar 13,06%. Selain itu, struktur ketenagakerjaan juga masih dihadapkan masih rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan, di mana per Agustus 2025, TPAK perempuan tercatat sebesar 56,63%. Meskipun terdapat kenaikan tipis dibandingkan periode sebelumnya, angka ini masih terpaut jauh dari TPAK laki-laki yang mencapai 84,40%. Ekosistem ketenagakerjaan yang berkualitas adalah ekosistem yang mendukung terciptanya pekerjaan layak, tenaga kerja kompeten, hubungan industrial harmonis, serta pasar kerja yang inklusif dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan koordinasi, sinkronisasi, perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan program lintas sektoral di bidang ketenagakerjaan.

**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

IKU.1.4 Indeks peningkatan kompetensi peserta Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi untuk Stimulus Ekonomi

**Deskripsi IKU**

Definisi
<p>Pembangunan SDM unggul menghadapi tantangan besar dalam peningkatan kualitas SDM dan daya saing tenaga kerja muda. Berdasarkan Sakernas Agustus 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 4,85%, di mana kelompok dengan usia 15-24 tahun memberikan porsi paling besar dengan TPT mencapai 16,89%. Selain itu, masih terdapat tingginya angka Not in Employment, Education, or Training (NEET) yang mencapai 19,44% di tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan rendahnya keterserapan angkatan kerja muda akibat kualifikasi pendidikan yang masih didominasi lulusan menengah ke bawah.</p> <p>Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi merupakan salah satu dari 8 Paket Akselerasi Ekonomi 2025 yang digulirkan pemerintah untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja sekaligus mendorong penyerapan tenaga kerja. Program pemagangan ini merupakan program pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh penyelenggara program pemagangan lulusan perguruan tinggi di bawah pendampingan, bimbingan, dan/atau pengawasan mentor atau pekerja yang menguasai pekerjaan dan proses produksi barang dan/atau jasa dalam rangka meningkatkan keterampilan atau keahlian tertentu bagi lulusan perguruan tinggi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, pengalaman kerja, dan kesempatan kerja bagi lulusan perguruan tinggi.</p> <p>Adapun peningkatan kompetensi oleh peserta pemagangan lulusan perguruan tinggi digunakan untuk mengukur peningkatan kompetensi (<i>softskills</i> dan <i>hardskills</i>) setelah menyelesaikan program pemagangan.</p>
Formula
<p>Peningkatan kompetensi dilihat dari rekapitulasi penilaian mentor kepada peserta magang terdiri dari 8 (delapan) aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kehadiran dan disiplin</li> <li>2. Sikap dan perilaku</li> <li>3. Kemampuan komunikasi</li> <li>4. Inisiatif dan tanggung jawab</li> <li>5. Kemampuan adaptasi</li> <li>6. Pengetahuan teknis</li> <li>7. Produktivitas dan ketepatan waktu</li> <li>8. Kerjasama tim</li> </ol> <p>Masing-masing aspek tersebut diukur dengan skala likert (1) Kurang, (2) Cukup, (3) Baik, dan (4) Sangat Baik. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil penilaian yang telah diisi oleh mentor terhadap seluruh peserta pemagangan dengan rumus perhitungan sebagai berikut:</p> $\text{Indeks Kompetensi} = \frac{\sum \text{Skor kompetensi total peserta yang menyelesaikan pemagangan}}{\text{Jumlah aspek penilaian} \times \text{Total peserta yang menyelesaikan pemagangan}}$

	Target keberhasilan dinyatakan tercapai apabila memenuhi nilai target yaitu 3 dari 4.		
	<b>Tujuan</b>		
	Indeks peningkatan kompetensi oleh peserta pemagangan lulusan perguruan tinggi bertujuan untuk mengukur peningkatan kompetensi ( <i>softskills</i> dan <i>hardskills</i> ) peserta magang setelah menyelesaikan program pemagangan.		
<b>Satuan Pengukuran</b>	Indeks		
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Kementerian Ketenagakerjaan		
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan		
<b>Sumber Data</b>	Kementerian Ketenagakerjaan		
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(...) High	<input checked="" type="checkbox"/> Moderate	(....) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(...) Exact	<input checked="" type="checkbox"/> Proxy	(.....) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(...) Sum	(.....) Average	<input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta	(.....) Cascading Non Peta	(....) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Direct	(....) Indirect	
<b>Polarisasi IKU</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	(...) Minimize	(.....) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	(....) Bulanan	(...) Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran
			(....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4

## .MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM KETENAGAKERJAAN  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN, DAN PARIWISATA**

KODE IKU: 2.1

**Sasaran Kegiatan**

SS.2. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas

**Deskripsi Sasaran Kegiatan**

Kebijakan yang berkualitas ditandai oleh kejelasan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta keterkaitannya dengan visi, rencana pembangunan, dan mandat kelembagaan. Kebijakan yang berkualitas disusun melalui proses yang inklusif dan terkoordinasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait serta mempertimbangkan keterpaduan lintas sektor untuk memastikan kebijakan tidak tumpang tindih, selaras dengan kebijakan lain, dan memperoleh dukungan dalam implementasinya. Terkait dengan itu mengamanatkan Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang menjalankan fungsinya sebagai:

1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden, berupa sinkronisasi dan koordinasi dalam perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja;
4. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata.

**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

IKU 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

**Deskripsi IKU**

**Definisi**

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya **rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).**

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, antara lain:

1. *link and match* lembaga pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja;
2. koordinasi pelatihan welder dan *hospitality* untuk penempatan kerja; dan
3. isu lainnya di bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

### **Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan**

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah dokumen pemetaan isu strategis seperti *link and match* lembaga pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja, pemetaan pelatihan welder dan *hospitality* untuk penempatan kerja, dan isu lainnya di bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja.

### **Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan**

Tahapan implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah dokumen implementasi kebijakan terkait *link and match* lembaga pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja, pemetaan lembaga pelatihan welder dan *hospitality* untuk penempatan kerja, dan isu lainnya di bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja.

### **Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan**

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah dokumen evaluasi kebijakan terkait *link and match* lembaga pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja, lembaga pelatihan welder dan *hospitality* untuk penempatan kerja, dan isu lainnya di bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja.

**Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik**

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah dokumen pelaksanaan komunikasi kebijakan terkait *link and match* lembaga pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja, lembaga pelatihan welder dan *hospitality* untuk penempatan kerja, dan isu lainnya di bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja.

**Formula**

**1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama**

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

**2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua**

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

**3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga**

$$\begin{aligned} \text{Nilai Tahapan Ketiga} \\ = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\% \end{aligned}$$

**4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat**

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

**5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian**

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan Ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}$$

**Tujuan**

Untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

**Satuan Pengukuran**

Persentase

**Unit/Pihak Penyedia Data**

Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan

**Pejabat Penanggung Jawab Data**

Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan

**Sumber Data**

Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan

**Tingkat Kendali IKU**

(...) High (X) Moderate (....) Low

**Tingkat Validitas IKU**

(X) Exact (...) Proxy (...) Activity

**Jenis Konsolidasi Periode**

(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value

**Jenis Cascading IKU**

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading

**Metode Cascading**

(...) Direct (X) Indirect

**Polarisasi IKU**

(X) Maximize (.....) Minimize (...) Stabilize

**Periode Pelaporan**

(...) Bulanan (X) Triwulanan (....)Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	80%	80%	85%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	20%	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	40%	40%	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	60%	60%	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	80%	80%	85%

## MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM KETENAGAKERJAAN  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN, DAN PARIWISATA

KODE IKU: 2.2

Sasaran Kegiatan

SS.2. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas

Deskripsi Sasaran Kegiatan

Kebijakan yang berkualitas ditandai oleh kejelasan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta keterkaitannya dengan visi, rencana pembangunan, dan mandat kelembagaan. Kebijakan yang berkualitas disusun melalui proses yang inklusif dan terkoordinasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait serta mempertimbangkan keterpaduan lintas sektor untuk memastikan kebijakan tidak tumpang tindih, selaras dengan kebijakan lain, dan memperoleh dukungan dalam implementasinya. Terkait dengan itu mengamanatkan Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang menjalankan fungsinya sebagai:

- a. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden, berupa sinkronisasi dan koordinasi dalam perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan;
- b. Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan;
- c. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 2.2 Indeks Efektivitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan

Deskripsi IKU

### Definisi

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya **rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).**

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan, antara lain:

1. Kebijakan terkait upah minimum;
2. Penguatan perlindungan pada sektor pekerjaan rentan; dan
3. Isu lainnya di bidang pengembangan ekosistem ketenagakerjaan.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

### **Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan**

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah dokumen terkait pemetaan isu strategis dan permasalahan upah minimum, dokumen pemetaan isu strategis dan permasalahan terkait penguatan perlindungan pada sektor pekerjaan rentan, dan dokumen isu lainnya di bidang pengembangan ekosistem ketenagakerjaan.

### **Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan**

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah dokumen implementasi kebijakan mitigasi PHK massal, dokumen penyelesaian isu strategis dan permasalahan upah minimum, dan dokumen isu lainnya di bidang pengembangan ekosistem ketenagakerjaan.

### **Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan**

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah dokumen evaluasi kebijakan terkait upah minimum, dokumen evaluasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan dan penguatan perlindungan pada sektor pekerjaan rentan, serta evaluasi terkait isu lainnya di bidang pengembangan ekosistem ketenagakerjaan.

#### **Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik**

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah dokumen pelaksanaan komunikasi kebijakan upah minimum, penguatan perlindungan pada sektor pekerjaan rentan, kebijakan mitigasi PHK masal, dan dokumen isu lainnya di bidang pengembangan ekosistem ketenagakerjaan.

#### **Formula**

##### **1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama**

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

##### **2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua**

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

##### **3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga**

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

##### **4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat**

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

##### **5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian**

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan Ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}$$

#### **Tujuan**

Untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait bidang Peningkatan Aksesibilitas, Konektivitas dan Tata Kelola di Bidang Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan

<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase		
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan		
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan		
<b>Sumber Data</b>	Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan		
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(...) High	(X) Moderate	(....) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(X) Exact	(...) Proxy	(...) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non Peta	(...) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(...) Direct	(X) Indirect	
<b>Polarisasi IKU</b>	(X) Maximize	(.....) Minimize	(...) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...)Semesteran (..) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	80%	80%	85%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	20%	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	40%	40%	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	60%	60%	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	80%	80%	85%

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PENGEMBANGAN  
EKOSISTEM KETENAGAKERJAAN  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

**KODE IKU: 3.1**

<b>Sasaran Kegiatan</b>	SS. 3 Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang berkualitas
-------------------------	--

<b>Deskripsi Sasaran Kegiatan</b>	<p>Layanan yang berkualitas merupakan layanan yang diselenggarakan secara profesional dan berstandar sehingga mampu memberikan kepastian proses, kemudahan akses, serta hasil layanan yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, layanan yang berkualitas ditandai dengan kemampuan penyelenggara layanan dalam merespons kebutuhan, masukan, dan permasalahan secara cepat, tepat, dan solutif, serta memastikan adanya tindak lanjut yang jelas dan terukur. Pelaksanaan layanan yang berkualitas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Efektivitas fasilitasi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan;</li> <li>b) Responsivitas terhadap kebutuhan koordinasi lintas sektor;</li> <li>c) Akurasi informasi dan berbasis data yang valid;</li> <li>d) Transparansi proses dan hasil pelayanan;</li> <li>e) Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung layanan.</li> </ol>
-----------------------------------	--

<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	3.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
--------------------------------------	--

<b>Deskripsi IKU</b>	<b>Definisi</b>
	Mengukur indikator tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survei ini terdiri atas 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.
	<b>Formula</b>
	Mengukur indikator tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:
	$\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$
<p>Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk masing-masing unit eselon II, dengan empat kategori penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4</li> <li>B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50</li> <li>C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00</li> <li>D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai &lt;2.50</li> </ol>	
<b>Tujuan</b>	
Mengukur tingkat kepuasan di proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.	

<b>Satuan Pengukuran</b>	Indeks		
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Asisten deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan		
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Asisten deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan		
<b>Sumber Data</b>	Hasil Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan		
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(....) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(...) Direct	(X) Indirect	
<b>Polarisasi IKU</b>	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	(....) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	N/A	N/A	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4

## MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM KETENAGAKERJAAN  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN, DAN PARIWISATA**

KODE IKU : 4.1

<b>Sasaran Kegiatan</b>	:	SS.4 Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
<b>Deskripsi Sasaran Kegiatan</b>		Pelaksanaan tata kelola organisasi yang baik merupakan pengelolaan organisasi yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien melalui kejelasan struktur organisasi, proses bisnis, serta pembagian peran dan tanggung jawab. Tata kelola tersebut bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara optimal, berorientasi pada hasil, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara terukur dan berkelanjutan. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Baik merupakan sasaran kegiatan pada Perspektif Pengembangan Internal yang diturunkan dari sasaran strategis Perspektif Pengembangan Internal pada level kedeputian. Ketercapaian sasaran kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas organisasi, sistem kerja, dan sumber daya pendukung, sehingga mampu mendukung terselenggaranya proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara efektif di lingkungan Asisten Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan.
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	:	IKU.4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputy Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
<b>Deskripsi IKU</b>	:	<p><b>Definisi</b></p> <p>Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputy Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputy Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputy didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputy Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan. Implementasi kegiatan RB General dan/atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.</p> <p>Adapun pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Asisten Deputy Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Manual IKU (TW I)</li> <li>2. Penyusunan Matrik Peran Hasil/MPH (TW I)</li> <li>3. Penyusunan TOR dan RAB Renja 2027, serta draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027 (TW II)</li> <li>4. Penyusunan matriks manajemen risiko (TW III)</li> <li>5. Monitoring pelaksanaan anggaran dan Revisi Renja 2026 (TW I,II,III,IV)</li> <li>6. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan (TW I,II,III,IV)</li> <li>7. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI (TW I-IV)</li> <li>8. Pemenuhan bukti dukung RB Tematik 2026</li> </ol> <p><b>Formula</b></p> <p>Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputy Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Asisten Deputy Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputy Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan :</p> $\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$ <p><b>Tujuan</b></p> <p>Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Asisten Deputy Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan.</p>
<b>Satuan Pengukuran</b>		Persentase
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>		Asisten Deputy Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan

<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>		Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
<b>Sumber Data</b>	:	Rekapitulasi/Tabulasi Data pengumpulan bukti dukung dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian
<b>Tingkat Kendali IKU</b>		<input checked="" type="checkbox"/> High                      (.....) Moderate                      ( ....) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>		(.....) Exact <input checked="" type="checkbox"/> Proxy                      (.....) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>		(.....) Sum                      (.....) Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta                      (...) Cascading Non Peta                      (.....) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>		(.....) Direct <input checked="" type="checkbox"/> Indirect
<b>Polarisasi IKU</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize                      (.....) Minimize                      (.....) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	:	(....) Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan                      (....) Semesteran                      (....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	N/A	N/A	85%	98,25%	92%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	22,22%	22,5%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	40%	38,89%	45,0%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	60%	60%	67,5%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	85%	98,25%	92,5%

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM KETENAGAKERJAAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terwujudnya Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas	1.1 Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah Tinggi	63.61%	Peningkatan Kompetensi Pekerja Keahlian Menengah Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemetaan <i>Link and Match Supply and Demand</i> Penyiapan Tenaga Kerja Keahlian Menengah Tinggi.</li> <li>Penyiapan Tenaga Kerja yang mendukung transformasi ekonomi (contoh digital, green jobs, hilirisasi, dll)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis Pemetaan <i>Link and Match Supply and Demand</i> Penyiapan Tenaga Kerja Keahlian Menengah Tinggi.</li> <li>Penyiapan Tenaga Kerja yang mendukung transformasi ekonomi (contoh digital, green jobs, hilirisasi, dll)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Rekomendasi Tindak lanjut Pemetaan <i>Link and Match Supply and Demand</i> Penyiapan Tenaga Kerja Keahlian Menengah Tinggi.</li> <li>Penyiapan Tenaga Kerja yang mendukung transformasi ekonomi (contoh digital, green jobs, hilirisasi, dll)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Advokasi <i>Link and Match Supply and Demand</i> Penyiapan Tenaga Kerja Keahlian Menengah Tinggi.</li> <li>Penyiapan Tenaga Kerja yang mendukung transformasi ekonomi (contoh digital, green jobs, hilirisasi, dll)</li> </ul>
		1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	56.40-59.32%	Koordinasi Penyusunan kebijakan tentang Ekonomi Perawatan untuk mendukung peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan penyusunan kerangka kebijakan dan baseline data ekonomi perawatan</li> <li>Penyusunan kerangka konsep Peta Okupasi Pekerja Perawatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan penyusunan draft awal kebijakan tentang Ekonomi Perawatan</li> <li>Pemetaan detail Peta Okupasi Pekerja Perawatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan finalisasi kebijakan tentang Ekonomi Perawatan</li> <li>Penyusunan Peta Okupasi Pekerja Perawatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan kebijakan tentang Ekonomi Perawatan</li> <li>Penetapan Peta Okupasi Pekerja Perawatan</li> </ul>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
		1.3 Cakupan Kepesertaan Pekerja pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional	35.09%	Percepatan implementasi regulasi dan evaluasi kebijakan untuk mendukung peningkatan cakupan kepesertaan Jamsostek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring implementasi kebijakan terkait penyesuaian iuran JKK dan JKm bagi Peserta Bukan Penerima Upah Sektor Transportasi</li> <li>Monitoring perluasan manfaat dan cakupan kepesertaan jamsostek Sektor Transportasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring implementasi kebijakan terkait penyesuaian iuran JKK dan JKm bagi Peserta Bukan Penerima Upah Sektor UMKM</li> <li>Monitoring perluasan manfaat dan cakupan kepesertaan jamsostek Sektor UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring implementasi kebijakan terkait penyesuaian iuran JKK dan JKm bagi Peserta Bukan Penerima Upah Sektor Jasa lainnya</li> <li>Monitoring perluasan manfaat dan cakupan kepesertaan jamsostek Sektor Jasa lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi implementasi kebijakan terkait PP No. 50 tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran JKK dan JKm bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU)</li> <li>Rekomendasi perluasan manfaat dan cakupan kepesertaan jamsostek</li> </ul>
		1.4 Indeks Peningkatan Kompetensi Peserta Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Untuk Stimulus Ekonomi	3 dari 4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Tahun 2025</li> <li>Monitoring Pelaksanaan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Tahun 2025</li> <li>Evaluasi Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Tahun 2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring Pelaksanaan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Tahun 2025</li> <li>Evaluasi Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Tahun 2025</li> <li>Penyiapan Pelaksanaan Program Tahun 2026</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Tahun 2026</li> <li>Monitoring Pasca Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Tahun 2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Tahun 2026</li> <li>Evaluasi Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Tahun 2026</li> </ul>
2	Terwujudnya Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian kebijakan di Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas	2.1 Persentase Efektivitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	85%	Koordinasi kebijakan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi penyiapan pelatihan <i>Welder</i> dan <i>Hospitality</i></li> <li>Monitoring Pelaksanaan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi pelaksanaan pelatihan <i>Welder</i> dan <i>Hospitality</i></li> <li>Monitoring Pelaksanaan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring pelaksanaan pelatihan <i>Welder</i> dan <i>Hospitality</i></li> <li>Evaluasi Pelaksanaan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi pelaksanaan program pelatihan <i>Welder</i> dan <i>Hospitality</i></li> <li>Evaluasi Pelaksanaan Revitalisasi Pendidikan Vokasi</li> </ul>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
	Tenaga Kerja yang Berkualitas	2.2 Persentase Efektivitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	85%	Koordinasi kebijakan pengembangan dan perbaikan ekosistemketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring implementasi kebijakan upah Minimum Wilayah Indonesia Barat</li> <li>Advokasi rekomendasi kebijakan penguatan perlindungan pada sektor pekerjaan rentan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring implementasi kebijakan upah Minimum wilayah Indonesia Timur/Tengah</li> <li>Penyusunan kebijakan penguatan perlindungan pada sektor pekerjaan rentan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi kebijakan upah Minimum terkait PP No. 49 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan</li> <li>Penyusunan kebijakan penguatan perlindungan pada sektor pekerjaan rentan</li> </ul>	<p>dan Pelatihan Vokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan Upah Minimum Tahun 2027</li> <li>Penetapan kebijakan penguatan perlindungan pada sektor pekerjaan rentan</li> </ul>
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	3 dari 4	Terselenggaranya pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan pelaksanaan survei layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di lingkup Keasdepan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan Semester 1 dengan K/L terkait dan mitra kerja sama lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan dan pelaporan survei layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di lingkup Keasdepan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan Semester 1 dengan K/L terkait dan mitra kerja sama lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tindak Lanjut survei layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di lingkup Keasdepan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan Semester 2 dengan K/L terkait dan mitra kerja sama lainnya</li> <li>Persiapan pelaksanaan survei layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di lingkup Keasdepan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan dan pelaporan survei layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di lingkup Keasdepan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan Semester 2 dengan K/L terkait dan mitra kerja sama lainnya</li> <li>Evaluasi layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di lingkup Keasdepan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan</li> </ul>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
							Semester 1 dengan K/L terkait dan mitra kerja sama lainnya	berdasarkan hasil survei
4	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	92%	Pelaksanaan tata kelola organisasi yang baik, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dan penetapan dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Manual IKU</li> <li>• Penyusunan Matrik Peran Hasil/MPH</li> <li>• Monitoring pelaksanaan anggaran dan Revisi Renja 2026</li> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI</li> <li>• Pemenuhan bukti dukung RB Tematik 2026</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan TOR dan RAB Renja 2027, serta draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027</li> <li>• Monitoring pelaksanaan anggaran dan Revisi Renja 2026</li> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI</li> <li>• Pemenuhan bukti dukung RB Tematik 2026</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan matriks manajemen risiko</li> <li>• Monitoring pelaksanaan anggaran dan Revisi Renja 2026</li> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI</li> <li>• Pemenuhan bukti dukung RB Tematik 2026</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring pelaksanaan anggaran dan Revisi Renja 2026</li> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI</li> <li>• Pemenuhan bukti dukung RB Tematik 2026</li> </ul>

Jakarta, Januari 2026

Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan,



**Chairul Saleh**

NIP. 1976083120021201001